

**Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
Jl. Raya Tlanakan no 9, Pamekasan**



LKJIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**



pa-pamekasan.go.id



pa.pmk126@gmail.com



089603169776

Kata Pengantar

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Pamekasan, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan.



M. Law.
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
EXECUTIVE SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Issue Strategis.....	7
E. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	13
1. Visi	14
2. Misi	14
3. Motto	14
4. Tujuan Strategis	14
5. Sasaran Strategis	15
6. Pohon Kinerja	16
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
D. Indikator Kinerja Utama	23
E. Matriks Kinerja dan Pendanaan	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	37
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	41
C. Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Rencana Kinerja Tahunan 2023	17
2.2	Lampiran Perjanjian Kinerja - Rencana Kinerja Tahun 2023	20
2.3	Indikator Kinerja Utama	23
2.4	Matriks Kinerja dan Pendanaan 2023	35
3.1	Capaian Kinerja 2023	37
3.2	Penjadwalan / Laporan Monitoring Pelaporan Kinerja	39
3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	41
3.4	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2021-2023	42
3.5	Perbandingan Realisasi Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Target MA RI	43
3.6	Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Banding 2021-2023	45
3.7	Perbandingan Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Banding dengan Target MA RI	46
3.8	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi 2021-2023	48
3.9	Perbandingan Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Banding dan Target MA RI	49
3.10	Rincian Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	51
3.11	Capaian IKM 2023	52
3.12	Perbandingan Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	53
3.13	Perbandingan Realisasi IKM dengan Target Mahkamah Agung RI	53
3.14	Persentase Responden Survey Indeks Kepuasan Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan	54
3.15	Persentase Karakteristik Responden Survey	54
3.16	Capaian Sasaran Strategis 2	55
3.17	Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu 2021-2023	56
3.18	Perbandingan Realisasi Persentase Salinan Putusan yang Diterima Pihak Tepat Waktu dengan Target MA RI	57
3.19	Perbandingan Realisasi Perkara Mediasi dengan Target MA RI	60

3.20	Status Keberhasilan Mediasi	61
3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	61
3.22	Perbandingan Perkara Prodeo 2021-2023	62
3.23	Perbandingan Realisasi Perkara Prodeo dengan Target MA RI	63
3.24	Analisis Efisiensi Pagu Prodeo	63
3.25	Capaian Sidang di Luar Gedung 2021-2023	65
3.26	Perbandingan Realisasi Sidang di Luar Gedung dengan Target MA RI	66
3.27	Analisis Efisiensi Pagu Sidang di Luar Gedung	67
3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Posbakum dengan Target MA RI	71
3.29	Analisis Efisiensi Pagu Posbakum	72
3.30	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	73
3.31	Realisasi Perkara yang Ditindaklanjuti 2021-2023	74
3.32	Perbandingan Realisasi Perkara Ditindaklanjuti dengan Target MA RI	75
3.33	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Belanja 51 & 52	78
3.34	Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023	78
3.35	Rincian Belanja Barang Tahun 2023	79
3.36	Realisasi Anggaran Belanja Modal	79
3.37	Rincian Belanja Modal Tahun 2023	80
3.38	Realisasi Anggaran DIPA 04	80
3.39	Rincian DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Thn 2023	81

Executive Summary

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, yaitu di bidang **Hukum dan Aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Pengadillaan Agama Pamekasan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian



PA Pamekasan Meraih Anugerah Ketua MA RI Th 2023
Peringkat II Terbaik Nasional Kinerja Layanan
E-COURT Kategori Pengadilan Agama Perkara 2501-5000

Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%	99,09%	119,39%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,88%	101,92%
		Kasasi	98%	99,96%	102,00%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	97,58%	121,97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	27,47%	183,13%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	244,50%	271,67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	86,30%	90,84%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Pamekasan dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

**PRESTASI YANG DIRAIH OLEH PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
SELAMA TAHUN 2023
(diurutkan berdasarkan tanggal)**



**Peringkat Terbaik I
dalam Bidang Kinerja E-Keuangan Perkara pada Kinsatker
di Lingkungan PTA Surabaya
Tanggal: 25 Januari 2023**



Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Peringkat Terbaik II

**Pengadilan Terbaik dalam Kinerja Layanan E-COURT
Kategori Peradilan Agama dengan Beban Kerja 2501-5000**

Tanggal: 16 Agustus 2023



Peringkat Terbaik I
Bidang Kinerja E-COURT Tingkat Pertama
Di Lingkungan PTA Surabaya
Tanggal: 26 Oktober 2023

01

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISSUE STRATEGIS
- SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020-2024, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang- undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal- hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan


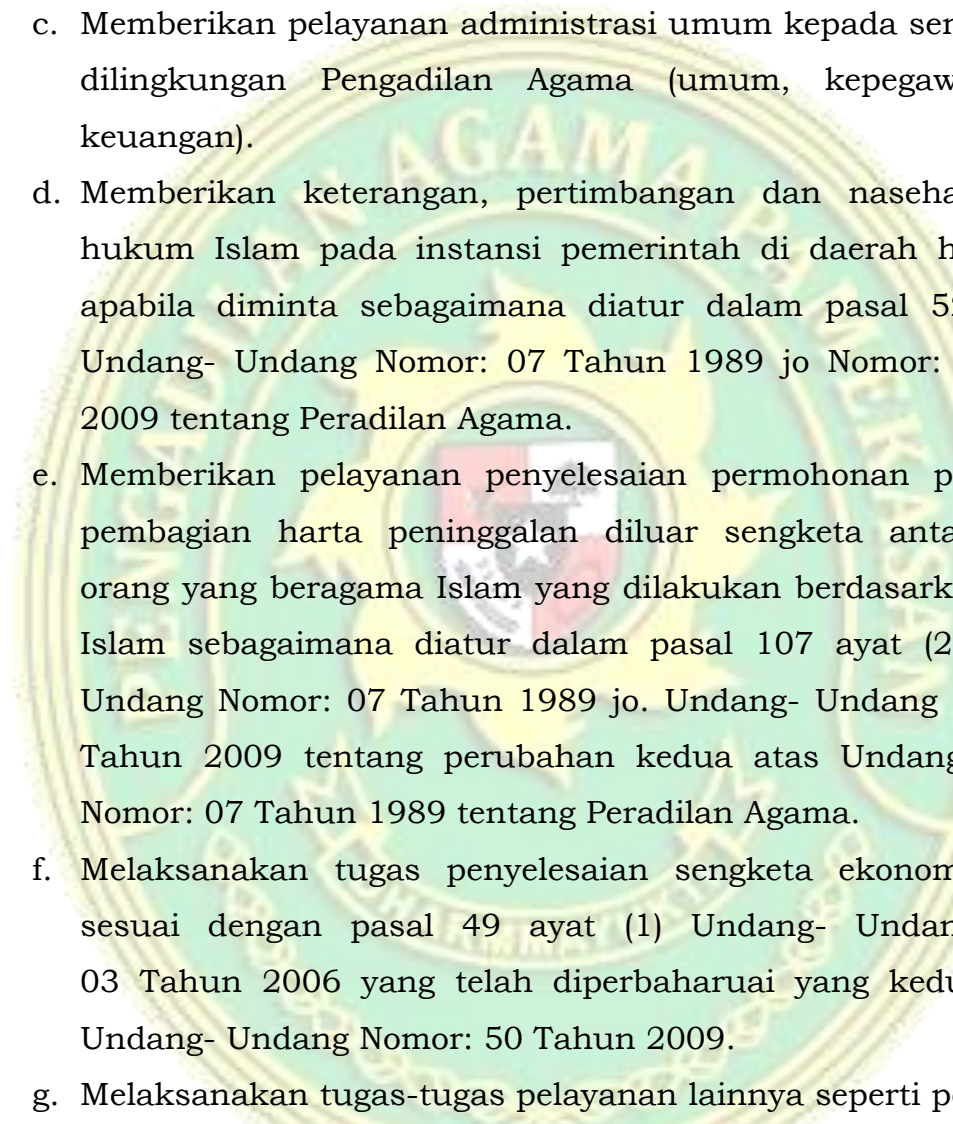
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang- undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 03 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 03 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 
- 
- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
 - b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua di bantu oleh Wakil Ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
3. Bidang Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera.
4. Bidang Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya Panitera di bantu oleh Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan selain itu di bantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti.
5. Bidang Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Bidang Kesekretariatan dalam menjalankan tugas ada Kasubag diantaranya Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Informasi dan Pelaporan, dan PLT Kasubag Organisasi dan Tatalaksana.

Kekuatan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ketua 1 Orang
2. Wakil Ketua 1 Orang
3. Hakim 5 orang
4. Panitera 1 Orang
5. Sekretaris 1 Orang
6. Panitera Muda 3 Orang
7. Kasubbag 2 Orang
8. Panitera Pengganti 4 Orang
9. Jurusita/ Jurusita Pengganti 2 Orang
10. Pranata Komputer 1 Orang

11. Staf 4 Orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pamekasan saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri :

1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 6 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
 2. Seorang Panitera, seorang Wakil Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing- masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 1 (satu) orang Panitera Pengganti,
 4. 1 (satu) orang Jurusita dan maksimum 2 (dua) orang Jurusita Pengganti;
 5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
 6. Ketatausahaan terdiri dari 15 orang termasuk 2 sopir, 12 pramubakti, 1 penjaga malam.
- Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 46.

D. Issue Strategis

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu masalah akses, lambatnya penyelesaian perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2016, telah memberikan akses seluas- luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang- undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berdasarkan undang-undang nomor: 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis

IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Meskipun korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korupsi. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korupsi, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan- tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari

paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik- praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Pamekasan.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Jalan Raya Tlanakan Pamekasan memiliki wilayah hukum terdiri 13 Kecamatan 11 Kelurahan dan 178 Desa, dengan luas wilayah 732,85 km² dan jumlah penduduk 818.662 jiwa.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada permasalahan/issu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pamekasan dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “One Day Minute dan One Day Publish”;
6. Optimalisasi fungsi ” One stop service ” bagi masyarakat pencari keadilan yang mana di Pengadilan Agama Pamekasan telah dibuat atau dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2022 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi,

misi dan motto serta tujuan Pengadilan Agama Pamekasan. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Pamekasan diri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan lembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan; serta Struktur Organisasi, Issue Strategis, dan Sistematika Laporan.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis tahun 2020-2024 (1. Visi, 2. Misi, 3. Motto 4. Tujuan dan Sasaran Strategis), Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



02

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS 2020-2024
 - VISI
 - MISI
 - MOTTO
 - TUJUAN STRATEGIS
 - SASARAN STRATEGIS
- RENCANA KINERJA 2023
- INDIKATOR KINERJA UTAMA
- MATRIKS KINERJA & PENDANAAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Pamekasan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Pamekasan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2025 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **Hukum dan Aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2025, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi- misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Motto

Motto Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada tahun 2019 yang mana Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto “ **ISTIKOMAH** ”. Inspiratif – Inovatif – Kompak – Amanah - Humanis

4. Tujuan Strategis

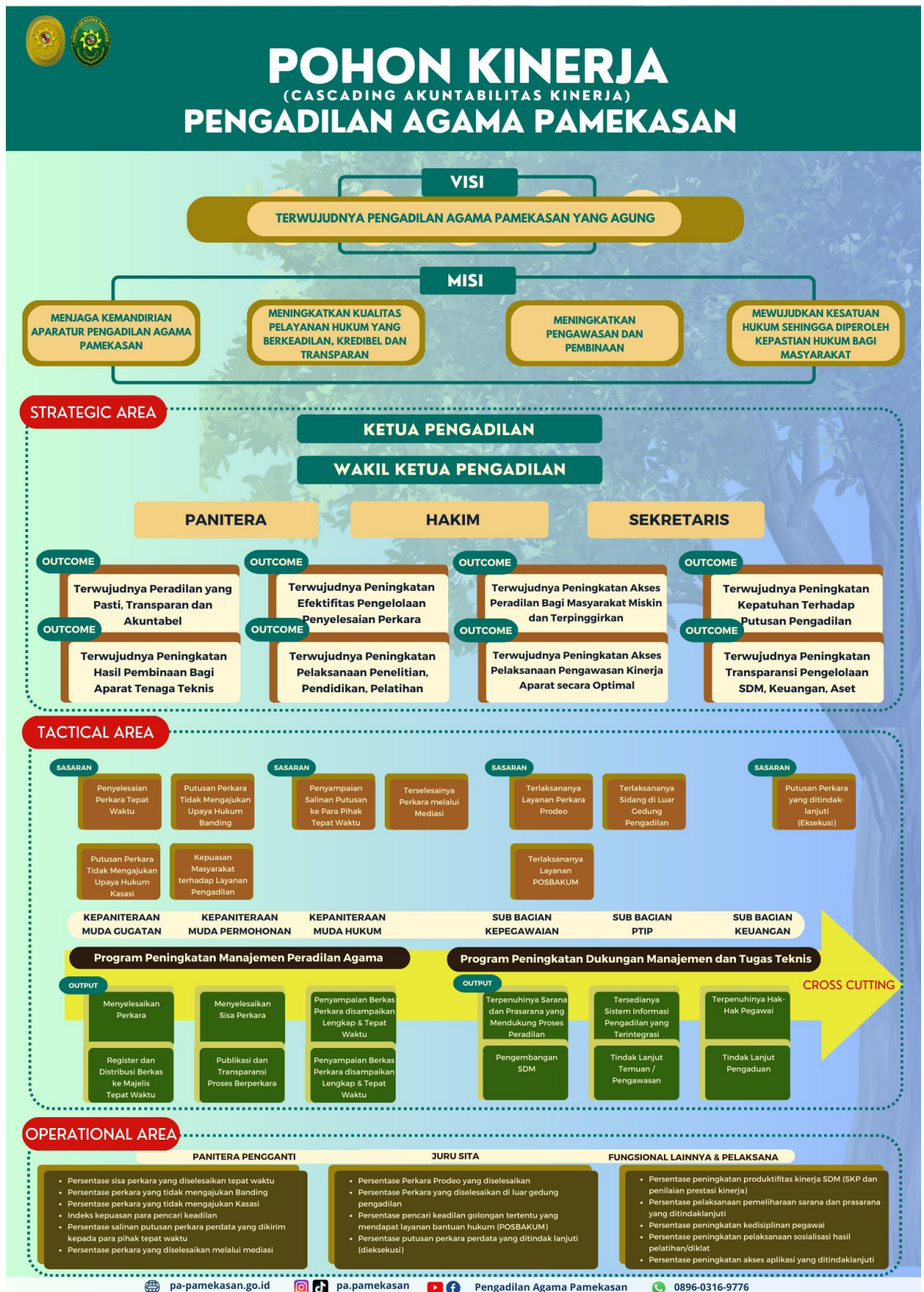
- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

- d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

5. Sasaran Strategis

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
- f. Index kepuasan pencari keadilan.
- g. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- i. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
- k. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- l. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- m. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- n. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
- o. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi).

6. Pohon Kinerja



B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Pengadilan Agama Pamekasan memiliki pedoman perencanaan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang mencakup rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan matriks indikator kinerja utama (IKU).

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Pamekasan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dan RPJM 2020 - 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.**

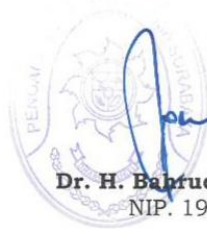
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Pamekasan, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

M.Syaefuddin, S.H.I, M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

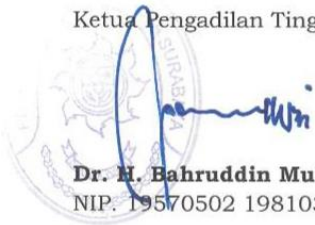
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	98%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	98%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000

2	Terwujudnya peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934.000
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan Pembebasan biaya/ Prodeo	100%	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	30 Perkara	12,000,000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	248 Perkara	13.500.000
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	700 Layanan	70.000.000

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
---	--	---	-----	---	---	--	------------	---------------

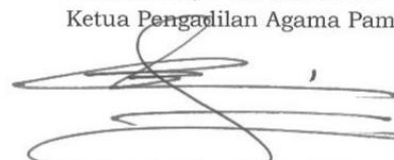
No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 95.500.000
2	- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.896.934.000
		Rp 4.992.434.000

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Pamekasan, 2 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007

D. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Pamekasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja dengan *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* (SMART). Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>Definisi Operasional: Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Sementara jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p>Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ </p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p>	Panitera	Laporan SIPP



			<p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p> <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan </p>		
		<p>b.Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Banding 	<p>Definisi Operasional: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Sementara jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p>	Panitera	Laporan SIPP



			<p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p>		
		<p>c.Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi 	<p>Definisi Operasional: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan SIPP



			<p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p>		
		<p>d. Index pencari keadilan yang puas terhadap peradilan</p>	<p>Definisi Operasional: Sesuai PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Formulasi Perhitungan: Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data:</p>	Panitera	Laporan Semesteran, bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>Periodik per semester pada tahun 2022</p> <p>Ambang Kinerja: Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80.</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang sampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>Definisi Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/ penetapan sesuai yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p>	Panitera	Laporan SIPP



		<p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p> <p>Catatan : • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>			
		<p>b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Definisi Operasional: Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p>	Panitera	Laporan SIPP



			<p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan</p>		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan 	Panitera	Laporan SIPP



		<p>adalah (jumlah perkara Prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</p> <p>Formulasi Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di E-SAKIP Komdanas</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">● PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat		
--	--	---	--	--



			Tidak Mampu di Pengadilan		
		<p>b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>Definisi Operasional: Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan SIPP



			<ul style="list-style-type: none"> ● PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 		
		<p>c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p>	<p>Definisi Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ● Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/ pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) ● Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>pengacara.</p> <p>Formulasi Perhitungan: <i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan La</i> <hr/><i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</i></p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di E-SAKIP Komdanas</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p> <p>Catatan : ● PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		
--	--	--	--	--	--



4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	<p>Definisi Operasional: Putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perkara permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.</p> <p>Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Satuan yang Digunakan: Persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas: Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data: Secara periodik selama tiap bulan pada tahun 2022 di SIPP</p> <p>Ambang Kinerja: Sangat Berhasil: >125% Berhasil: 100%-125% Cukup Berhasil: 75% - 99,9% Kurang Berhasil: 30% - 74,99% Tidak Berhasil: 0% - 29,9%</p>	Panitera	Laporan SIPP
----	--	---	--	----------	--------------

E. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan 2023

Matriks Kinerja dan Pendanaan								
KODE	PROGRAM / KEGIATAN	KOMPONEN PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		ALOKASI	
					2023		2023	
					VOL	ANGGARAN	REALISASI	%
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
1053.AE A		Percepatan Penyelesaian Perkara	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Perkara yang diselesaikan tepat waktu				
				Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding				
				Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
				Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap peradilan				
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Salinan putusan yang sampaikan ke para pihak tepat waktu								
				Perkara yang diselesaikan melalui mediasi				



			Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
1053.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	382 ORG	70.000.000	69.996.000	99,99
1053.QC A		Perkara Hukum Perseorangan		Perkara prodeo yang diselesaikan	30 PKR	12.000.000	11.850.000	98,75
				Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	248 PKR	13.500.000	13.415.000	99,37

03

AKUNTABILITAS KINERJA

- PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- REALISASI ANGGARAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 dengan realisasinya. Indikator capaian kinerja tersebut mengacu pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%	99,09%	119,39%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,88%	101,92%
		Kasasi	98%	99,96%	102,00%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	97,58%	121,97%
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan	100%	100%	100%

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	27,47%	183,13%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	244,50%	257,36%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	86,30%	90,84%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak. Dalam pengukuran kinerja, Pengadilan Agama Pamekasan memiliki pedoman teknis yang mencakup pengumpulan dan pengukuran kinerja dan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi.

Tabel 3.2

PENJADWALAN / LAPORAN MONITORING PELAPORAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA		PERIODE PELAPORAN MONITORING PELAPORAN KINERJA				SATUAN PELAPORAN KINERJA
SASARAN STRATEGI	IKU	BLN	TW	SMT	THN	
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	v				Dokumen Laporan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	v				Dokumen Laporan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	v				Dokumen Laporan
	Index Kepuasan Pencari Keadilan			v		Dokumen Laporan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	v				Dokumen Laporan

	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	v				Dokumen Laporan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	v				Dokumen Laporan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	v				Dokumen Laporan
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	v			v	Dokumen Laporan
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	v	v		

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	99,09%	119,39%
2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	98%	99,84%	101,88%
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	98%	99,96%	102%
4	Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	80%	97,58%	121,97%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target. Pada tahun 2023 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2526 perkara dan perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2503 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 = $2503/2526 \times 100\% = 99,09\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2023 = $99,09/83 \times 100 = 119,39\%$.

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Adapun realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Sisa perkara tahun sebelumnya	189	97	130
Perkara Diterima	2359	2685	2520
Perkara Diputus	2652	2652	2526
Perkara diputus kurang dari 5 bulan	2437	2645	2503
Perkara diputus lebih dari 5 bulan	14	7	23
Target	83%	83%	83%
Realisasi	95,64%	99,99%	99,09%
Capaian	115,23 %	120,46 %	119,39 %



Target penyelesaian perkara pada tahun 2023 telah terpenuhi dari jumlah perkara sisa tahun 2022 sejumlah 130 perkara dan

perkara yang diterima tahun 2023 sejumlah 2650 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 95,32%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah terpenuhi.

c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 100%.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	99,09	100

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis-Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 8) selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu **sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan**, namun **belum memenuhi target kinerja Mahkamah Agung RI**. Penyebab realisasi pada indikator ini belum mencapai 100% adalah jumlah perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 23 perkara, meningkat drastis dari tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang menyebabkan penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut:

- Adanya perceraian yang penggugat/pemohon dan tergugat/termohon berstatus PNS/TNI/Polri sehingga diperlukan surat izin perceraian dari pimpinan, sehingga sidang ditunda
- Adanya perkara ghoib / salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Perkara ghoib membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pemanggilan, sehingga sidang ditunda
- Adanya perkara kewarisan yang obyek sengketanya banyak dan para pihak atau kuasa hukum beralamat di luar daerah sehingga memerlukan delegasi panggilan / pemberitahuan
- Adanya perkara cerai gugat yang kompilasi dengan harta bersama yang memerlukan proses persidangan cukup lama

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, diantaranya:

- Monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui Rapat Bulanan, Rapat Kepaniteraan, maupun group whatsapp internal;
- Memaksimalkan penggunaan *court calendar* untuk penyelesaian perkara

2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Banding

a. Perbandingan dengan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 berhasil memutus 2526 perkara, dengan rincian 1527 perkara gugatan dan 995 perkara permohonan, dan 4 perkara gugatan sederhana, dari perkara putus tersebut yang mengajukan Banding sebanyak 3 perkara, sehingga yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 2523 perkara. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah 99,88% sedangkan target sebesar 98% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 101,92%.

- Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 = $2523/2526 \times 100\% = 99,88\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2023 = $99,88/98 \times 100 = 101,92\%$.

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum banding pada 3 tahun terakhir:

Tabel 3.6 Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Banding 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Perkara diputus	2451	2652	2526

Perkara yang dimohonkan Banding	8	7	3
Perkara yang tidak mengajukan Banding	2443	2645	2523
Target	98%	98%	98%
Realisasi	99,67%	99,73%	99,88%
Capaian Kinerja	101,70 %	101,76 %	101,92 %

c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 50%.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Banding dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99,88	50

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LIPA 2) selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding **sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan**, sekaligus **memenuhi target kinerja Mahkamah Agung RI**. Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan telah memberikan putusan yang berkualitas dan adil sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh para pihak.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa Langkah yang akan dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan untuk meningkatkan capaian atas indikator persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding, yaitu:

- Meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas sumber daya Hakim dan tenaga teknis melalui diskusi hukum dan bimbingan teknis
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan terbaru

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 berhasil memutus 2526 perkara, dengan rincian 1527 perkara gugatan dan 995 perkara permohonan, dan 4 perkara gugatan sederhana, dari perkara putus tersebut yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 1 perkara. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi untuk perkara voluntair

adalah 99,96%, sedangkan target sebesar 98% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 102,00%.

- Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 = $2525/2526 \times 100\% = 99,96\%$
- Capaian Kinerja tahun 2023 = $99,96/98 \times 100 = 102,00\%$.

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi pada 3 tahun terakhir:

Tabel 3.8 Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Perkara diputus	2451	2652	2526
Perkara yang dimohonkan Kasasi	0	0	1
Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	2451	2652	2525
Target yang Tidak Mengajukan	98%	98%	98%
Realisasi	100%	100%	99,96%
Capaian Kinerja	102,04 %	102,04 %	102%

c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 50%.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Banding dan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99,96	50

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 2) selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pada tahun 2023 terdapat satu perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, hal ini menandakan bahwa telah meningkat pengetahuan masyarakat mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh apabila merasa kurang puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Meskipun begitu, realisasi dari indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding **sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan, sekaligus memenuhi target kinerja Mahkamah Agung RI.**

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa Langkah yang akan dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan untuk meningkatkan capaian atas indikator persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding, yaitu:

- Meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas sumber daya Hakim dan tenaga teknis melalui diskusi hukum dan bimbingan teknis
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan terbaru

4. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Selama Tahun 2023, Pengadilan Agama Pamekasan melakukan survey terhadap layanan peradilan sebagai salah satu instrument atas keikutsertaan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Dalam survey tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mematok target Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80%.

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,90** atau konversi IKM sebesar **97,58%**. Target yang dicanangkan sebesar 80%, sehingga capaian untuk sasaran ini adalah **121,97%**.

**Tabel 3.10 Rincian Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Pengadilan**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1.	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	3.91	Sangat Baik
2.	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini	3.9	Sangat Baik
3.	Prosedur / Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan	3.91	Sangat Baik
4.	Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima bapak/ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini	3.9	Sangat Baik
5.	Tarif / Biaya Pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan	3.92	Sangat Baik
6.	Sarana/prasarana pendukung pelayanan online disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan / mudah digunakan	3.84	Sangat Baik

7.	Petugas pelayanan pada unit layanan ini merespon keperluan bapak / ibu dengan cepat	3.92	Sangat Baik
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/ diakses	3.92	Sangat Baik
Rata Rata Tertimbang		3.90	Sangat Baik
Konversi Nilai		97,58	

- Realisasi responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 berdasarkan nilai konversi IKM = $97,58/100 \times 100\% = 97,58\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2023 = $97,58/80 \times 100 = 121,97\%$.

Tabel 3.11 Capaian IKM 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
Kinerja	2023	2023	2023
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	97,58%	121,97%

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Selama 2 (dua) tahun terakhir, capaian kinerja dari Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan mengalami peningkatan dari 89,66% pada tahun 2022 menjadi 97,58% pada tahun 2023.

Tabel 3.12 Perbandingan Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	80%	89,66%	112,07%
2023	80%	97,58%	121,97%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80%.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi IKM dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99,96	80

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Penyusunan Survey Persepsi Kualitas Layanan (SPKP) Pengadilan Agama Pamekasan Periode II Tahun 2023 (terlampir).

Laporan tersebut merupakan hasil dari survey pelayanan pada tahun 2023 pada 500 responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Persentase Responden Survey Indeks Kepuasan Pengadilan Agama Pamekasan Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No	Karakteristik	Persentase (%)	
1.	Jenis Kelamin	Perempuan 261 (51,58%)	Laki-laki 245 (48,42%)
2.	Pendidikan Terakhir	SMA / (Sederajat) 233 (45,05%)	SI 107 (21,15%)
3.	Pekerjaan	Mengurus rumah tangga 128 (25,30%)	Karyawan Swasta 105 (20,75%)

Tabel 3.15 Persentase Karakteristik Responden Survey Indeks Kepuasan Pengadilan Agama Pamekasan

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Layanan penyerahan produk pengadilan	194 (38,80%)
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	168 (33,60%)
Layanan penyelesaian perkara	138 (27,60%)

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Peningkatan nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan disbanding tahun lalu dikarenakan Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pamekasan, seperti: ruang laktasi yang memadai, pojok bermain anak, renovasi musholla untuk para pihak, serta area khusus merokok
- Penerapan budaya pelayanan prima sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan, penerapan 5S dan peningkatan penggunaan teknologi informasi
- Adanya rapat pembinaan, rapat dinas rutin bulanan, rapat kepaniteraan, dan rapat kesekretariatan sebagai monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang diberikan.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan maka diambil langkah- langkah :

- o Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
- o Melengkapi Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada

SASARAN STRATEGIS 2
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	27,47%	183,13%

1. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2023 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang diputus sejumlah 2526 perkara dan isi putusan yang telah diterima oleh para pihak sejumlah 2526. Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100 %.

- Realisasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2022 = $2652/2652 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

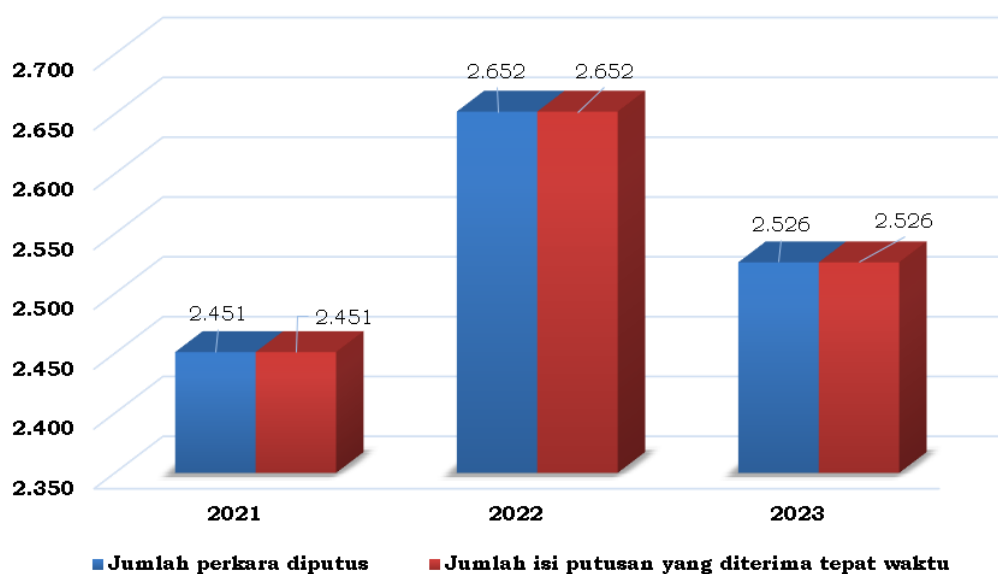
b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah perkara diputus	2451	2652	2526
Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	2451	2652	2526
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian Kinerja	100%	100%	100%

Salinan Putusan / Penetapan yang dikirim tepat waktu



c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak / dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah 20%

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Persentase Salinan Putusan yang Diterima Pihak Tepat Waktu dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak	100	20

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis-Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 8) selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dicapai dengan baik. Keberhasilan dari indikator tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memastikan petugas peradilan khususnya yang menangani penyampaian Salinan putusan melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan professional
- Meningkatkan teknologi untuk menunjang penyampaian Salinan putusan
- Pengawasan secara berkelanjutan dari atasan/pimpinan

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan akan menerapkan upaya-upaya seperti:

- Mempercepat minutasasi pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat upload putusan melalui direktori putusan pada hari yang sama saat putusan

- Mempercepat proses pemberkasan perkara yang telah putus dibuat arsip berkas perkara pada hari yang sama
- Melakukan DDTK kepada petugas layanan produk pengadilan agar memberikan layanan prima

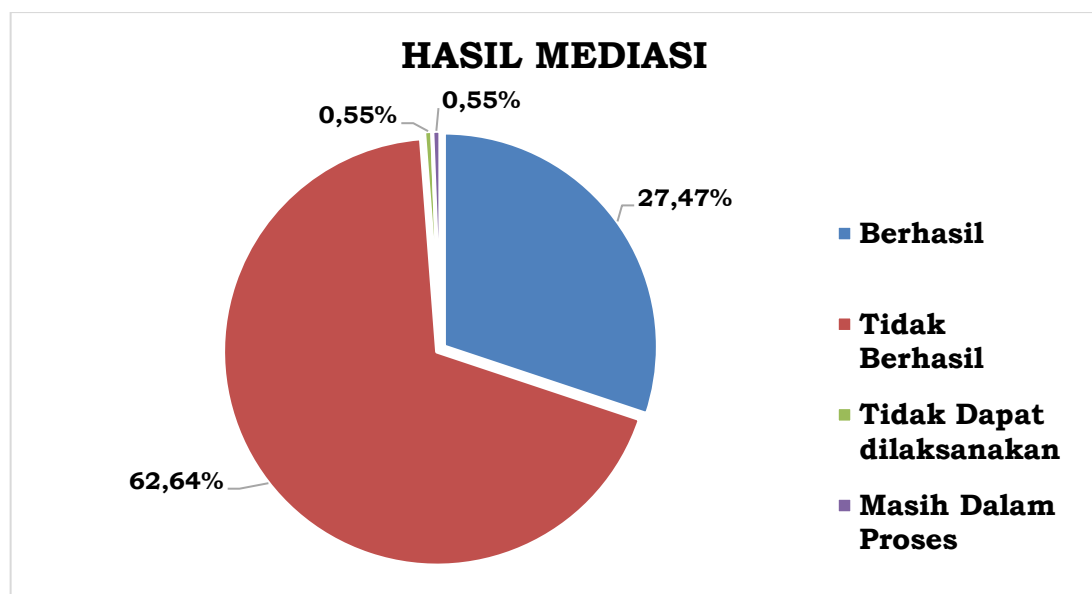
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun Ini

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan mediasi sebanyak 182 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 50 perkara berhasil (45 perkara berhasil sebagian, 2 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 3 perkara berhasil dengan akta perdamaian), 114 perkara tidak berhasil, 1 perkara tidak dapat dilaksanakan dan 17 perkara masih dalam proses mediasi.

- Realisasi Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2023= $50/182 \times 100\% = 27,47\%$
- Capaian Kinerja = $27,47/15 \times 100\% = 183,13\%$

Grafik MEDIASI



b. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 25%

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Perkara Mediasi dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	27,47	25

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

c. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Mediasi pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 8) selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Peradilan secara Elektronik, Pengadilan Agama

Pamekasan telah menangani perkara yang dimediasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.20 Status Keberhasilan Mediasi

Beban Perkara (Sisa Lalu + Diterima)	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi						Sisa Mediasi
		Berhasil dengan Akta	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat dilaksanakan	Total	
2.650	182	3	2	45	114	1	165	17

Target mediasi perceraian pada umumnya diarahkan untuk merukunkan Kembali kedua belah pihak (suami dan istri) dan mendorong perceraian dengan cara yang baik. Sebab, faktanya bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa dimediasikan.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja mediasi, Pengadilan Agama Pamekasan melakukan langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM Mediator, serta memahami karakter dan budaya setempat
- Memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kelebihan/manfaat mediasi, serta dampak perceraian
- Meningkatkan sarana dan prasarana ruang mediasi agar menunjang proses mediasi

SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	244,50%	257,36%

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun Ini

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 mendapat alokasi perkara sejumlah 30 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan terhadap pembebasan biaya perkara dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2023 = $30/30 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.22 Perbandingan Perkara Prodeo 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Diterima	10	30	30
Diputus	10	30	30
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian Kinerja	100%	100%	100%

- c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI**
Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 30%

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Perkara Prodeo dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	30

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Daya

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Prodeo pada Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator: Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tabel 3.24 Analisis Efisiensi Pagu Prodeo

Pagu Pembebasan Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Persentase Penyerapan Pagu Pembebasan Biaya Perkara (%)
12.000.000	11.850.000	98,75%

Dalam DIPA 401540 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023, memuat kegiatan: perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan pagu Rp 12.000.000,-. Anggaran tersebut direalisasikan 98,75% untuk memenuhi kebutuhan belanja barang persediaan barang konsumsi (biaya proses dan materai) serta belanja perjalanan dinas dalam kota (biaya panggilan dan pemberitahuan putusan). Sisa anggaran pada pagu pembebasan biaya perkara sejumlah Rp 150.000 pada akun Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota, dikarenakan terdapat selisih rencana panggilan dibandingkan dengan realisasi panggilan perkara sejumlah 1 panggilan.

Berdasarkan data tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menggunakan sumber daya pada indikator perkara prodeo yang diselesaikan secara efektif namun belum efisien. Dengan capaian kinerja 100% dan penyerapan anggaran 98,75%.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 mampu mencapai target indikator pembebasan biaya perkara (prodeo) 100% sebanyak 30 perkara. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Pamekasan sudah sadar akan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Pengadilan Agama Pamekasan sudah melaksanakan sosialisasi terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Namun, dari segi anggaran prodeo, PA Pamekasan hanya mencapai 98,75%. Terdapat sisa anggaran untuk panggilan pada pagu Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota sebesar Rp 150.000, dikarenakan terdapat satu (1) perkara prodeo yang dialokasikan 4 kali panggilan, namun dalam realisasinya Majelis Hakim sudah memutuskan perkara tersebut sehingga hanya membutuhkan 3 kali panggilan, sehingga menyisakan anggaran Rp 150.000.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan program:

- Melaksanakan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembebasan biaya perkara kepada para pihak pada saat pendaftaran
- Mengumumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut melalui poster / banner
- Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DIPA 04 pembebasan biaya perkara

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun Ini

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 mendapat alokasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sejumlah 248 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan perkara dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 = $248/248 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.25 Sidang di Luar Gedung 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Alokasi Sidang Diluar Gedung	138	228	248

Realisasi Sidang Diluar Gedung	138	228	248
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian Kinerja	100%	100%	100%



- c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI**
Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah 100%

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Sidang di Luar Gedung dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	100

Miskin Dan Terpinggirkan			
-----------------------------	--	--	--

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Sidang Keliling / Sidang di Luar Gedung selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator: Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Tabel 3.27 Analisis Efisiensi Pagu Sidang di Luar Gedung

Pagu Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Persentase Penyerapan Pagu Sidang di Luar Gedung Pengadilan (%)
13.500.000	13.415.000	99,37%

Dalam DIPA 401540 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023, memuat kegiatan: Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung. Pagu dalam kegiatan tersebut sebesar Rp 13.500.000,- dengan penyerapan Rp 13.415.000,- atau sebesar 99,37%. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Sewa (gedung/ruang rapat dan *sound system*/meja dan kursi) dan

Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (Transportasi dan Uang Harian).

Penyebab pencairan anggaran tidak mencapai 100% adalah terdapat anggaran yang tidak dicairkan karena terdapat sisa pada item Biaya Perjalanan Transport dalam Kota sejumlah Rp 85.000 karena sisa pagu tersebut di bawah jumlah harga satuan uang transport (Rp 100.000). Meskipun begitu, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 mampu mencapai target indikator Sidang di Luar Gedung / Sidang Keliling 100% sebanyak 248 perkara. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Pamekasan sudah sadar akan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Pengadilan Agama Pamekasan sudah melaksanakan sosialisasi terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Namun, dari segi anggaran Sidang di Luar Gedung, PA Pamekasan hanya mencapai 99,37%. Terdapat sisa anggaran untuk panggilan pada item Uang Transport sebesar 0,63% atau Rp 85.000. Anggaran tersebut tidak dicairkan karena sisa pagu tersebut di bawah jumlah harga satuan uang transport (Rp 100.000). Meskipun begitu, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan telah Menyusun program sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait pelaksanaan sidang keliling

- Menyusun tim pelaksanaan sidang keliling
- Melakukan MoU dengan pihak-pihak terkait, misal KUA dan Pemerintah Desa tentang pelaksanaan sidang keliling
- Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DIPA 04 Sidang di Luar Gedung

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Posbakum ditujukan terutama untuk masyarakat miskin yang menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Petugas Posbakum Pengadilan adalah pemberi layanan di posbakum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang berasal dari lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan yang bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan posbakum pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Uniknya, bagi dua pihak yang berperkara, penggugat dan tergugat, masing-masing bisa meminta bantuan hukum di Posbakum tersebut. Namun, pemberian jasa bantuan hukum bagi keduanya tak boleh

diberikan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama. Tentu saja tidak mungkin seorang advokat bertindak atas nama penggugat dan tergugat sekaligus. Untuk itu ada kemungkinan dalam satu Pengadilan Agama dibentuk lebih dari satu Posbakum. Alasannya untuk menghindari agar penggugat dan tergugat tak diwakili oleh satu orang yang sama. Dalam Pedoman itu juga disebutkan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerja sama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu (masyarakat miskin dan terpinggirkan) yang mendapat Layanan Bantuan Hukum adalah perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum. Pengadilan Agama Pamekasan sendiri menggunakan jasa Posbakum yang sudah melewati proses seleksi di awal tahun melalui pengadaan barang/jasa.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun Ini

Posbakum dibiayai oleh DIPA Badan Peradilan Agama sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan target 382 jumlah jam layanan ini telah diselesaikan seluruhnya bahkan melebihi dari target jam layanan yang telah ditetapkan sebesar 934 jumlah jam layanan, sehingga capaian kinerja terhadap target pada sektor ini melebihi capaian layanan dan terealisasi penyerapannya sebesar 244,50%.

- Realisasi Jam Layanan POSBAKUM tahun 2023 = $934/382 \times 100\%$
= 244,50%.
- Capaian Kinerja = $244,50/95 \times 100\%$ = 257,36%.

b. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100%

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Posbakum dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	257,36	100

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

c. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Posbakum selama tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator: Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tabel 3.29 Analisis Efisiensi Pagu Posbakum

Pagu Pos Bantuan Hukum (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Persentase Penyerapan Pagu Pagu Pos Bantuan Hukum (%)
70.000.000	69.996.000	99,99 %

Dalam DIPA 401540 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023, memuat kegiatan: Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dengan pagu Rp 70.000.000,- dengan penyerapan Rp 69.996.000,- atau sebesar 99,99%. Anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum.

Penyebab pencairan anggaran tidak mencapai 100% karena nominal kontrak Posbakum dibulatkan sebesar Rp 5.833.000,- per bulan, dengan sisa anggaran hanya Rp 4.000,-. Indikator ini dapat dikategorikan sebagai efisien, dengan capaian kinerja 244,5%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 pada indikator Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan target 700 orang / jam layanan dan jumlah realisasi yang **dicapai melebihi target** yakni sebesar 934 orang / jam layanan atau 257,36%, serta memenuhi target kinerja Mahkamah Agung RI.

Keberhasilan dari indikator ini didukung oleh kerjasama PA Pamekasan dengan Posbakum LKBH IAIN Madura yang selalu tersedia sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Pengadilan Agama Pamekasan telah menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut:

- Membuat pengumuman tentang pengadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Pamekasan
- Membuat MoU dengan Lembaga bantuan hukum yang menang lelang
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan posbakum

SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	86,30%	90,84%

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun Ini

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan eksekusi riil yang diterima di Pengadilan Agama Pamekasan. Hal ini disebabkan **para pihak menjalani eksekusi secara suka rela tanpa bantuan pengadilan.**

- Realisasi Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti / Dieksekusi (secara sukarela oleh para pihak) tahun 2023
 - Perkara dikabulkan tahun 2023 = 2.280
 - Jumlah perkara masuk tahun 2023 = 2.650

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Dikabulkan}}{\text{Jumlah Perkara Masuk}} \times 100\% = \frac{2.280}{2.650} \times 100\% = 86,30\%$$

- Capaian Kinerja
86,30/95 x 100% = 90,84%.

b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.31 Realisasi Perkara yang Ditindaklanjuti 2021-2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Realisasi (%)	
	2023	2023	2023	2022	2021
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	86,30%	90,84%	100%	99,62%

c. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Rencana Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, target pada indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 75%

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Perkara Ditindaklanjuti dengan Target MA RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target MA RI (%)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	86,30	75

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2023.

d. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir)

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat anggaran DIPA pada sasaran strategis ini di Pengadilan Agama Pamekasan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) **belum memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan, namun sudah memenuhi target kinerja Mahkamah Agung RI.**

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2023 tidak menerima permohonan eksekusi riil dari para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim dapat

memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga pihak menjalankan isi putusan secara sukarela, tanpa ada permohonan eksekusi melalui pengadilan. Dan pada sisi lain karena disebabkan biaya eksekusi riil lebih tinggi dibanding dengan permohonan eksekusi oleh para pihak pencari keadilan.

Perkara yang ditindaklanjuti secara sukarela oleh para pihak adalah seluruh perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2023, yaitu sejumlah 2.280 perkara dari seluruh perkara yang diterima sebanyak 2.650 perkara. Tidak semua perkara yang diterima di PA Pamekasan ditindaklanjuti secara sukarela oleh para pihak disebabkan perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena perkara yang dicabut (185 perkara), ditolak (19 perkara), tidak diterima (23 perkara), digugurkan (13 perkara), dicoret dari register (3 perkara), perdamaian (3 perkara).

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, Pengadilan Agama Pamekasan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi lintas sektoral yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pihak keamanan
- Melakukan rapat untuk menelaan dan mengkaji eksekusi termasuk memahami obyek eksekusi terkait potensi sehingga eksekusi dapat dilaksanakan

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran

Program kerja Pengadilan Agama Pamekasan adalah melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, yaitu Program Dukungan Manajemen dimana ada 2 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Masing-masing Program Kerja tersebut didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Pamekasan memperoleh 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu:

1. **DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor DIPA-005.01.2.401539/2023 tanggal 30 November 2022 dengan total pagu Rp 4.896.934.000,-**

Selama kurun waktu 2023, pagu anggaran DIPA melebihi anggaran awal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga ada revisi penambahan anggaran dikarenakan adanya mutasi pegawai masuk serta Anggaran Biaya Tambahan (ABT) ke Pengadilan Agama Pamekasan. Total pagu DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan pada akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.761.068.000,- dengan rincian sebagai berikut:

A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Belanja 51 & 52

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	3.328.557.000	3.446.557.000	3.415.539.413	99,1	31.017.587
Belanja Barang	1.568.337.000	1.614.305.000	1.601.774.572	99,2	12.530.428
Belanja Barang (Ekstra komptabel)		8.892.000	8.880.000	99,8	12.000

Tabel 3.34 Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.291.581.000	1.354.581.000	1.352.813.200	99,87%	1.767.800	0,13%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	22.000	20.160	91,64%	1.840	9,13%
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	129.160.000	111.160.000	110.062.648	99,01%	1.097.352	1,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.744.000	36.744.000	36.209.338	98,54%	534.662	1,48%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00%	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.333.990.000	1.393.990.000	1.393.770.000	99,98%	220.000	0,02%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	220.425.000	155.704.000	155.645.667	99,96%	58.333	0,04%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	70.653.000	82.653.000	81.110.400	98,13%	1.542.600	1,90%
511129	Belanja Uang Makan PNS	194.040.000	261.761.000	236.613.000	90,39%	25.148.000	10,63%
511151	Belanja Tunj Umum PNS	20.942.000	18.942.000	18.295.000	96,58%	647.000	3,54%
Jumlah		3.328.557.000	3.446.557.000	3.415.539.413	99,10%	31.017.587	0,91%

Tabel 3.35 Rincian Belanja Barang Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
002.OA.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	780.807.000	780.054.950	99,90%	752.050	0,10%
002.OA.521811	Belanja Barang Persediaan barang	48.680.000	48.674.620	99,99%	5.380	0,01%
002.OB.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	168.110.000	168.000.000	99,93%	110.000	0,07%
002.OB.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.860.000	1.860.000	100,00%	0	0,00%
002.OB.522111	Belanja Langganan Listrik	11.420.000	11.420.000	100,00%	0	0,00%
002.OB.522112	Belanja Langganan Telepon	828.000	824.114	99,53%	3.886	0,47%
002.OB.522113	Belanja Langganan Air	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%
002.OB.522141	Belanja Sewa	2.790.000	2.788.305	99,94%	1.695	
002.OC.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran	245.140.000	245.136.000	100,00%	4.000	0,00%
002.OC.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.590.000	127.445.483	99,89%	144.517	0,11%
002.OD.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.950.000	17.950.000	100,00%	0	0,00%
002.OD.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68.676.000	57.847.000	84,23%	10.829.000	18,72%
002.OE.521119	Belanja Barang Operasional lainnya	6.564.000	6.559.000	99,92%	5.000	0,08%
002.OF.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.210.000	65.548.500	99,00%	661.500	1,01%
002.OF.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	1.000.000	100,00%	0	0,00%
002.OG.521119	Belanja Belanja Operasional Lainnya	5.520.000	5.519.500	99,99%	500	0,01%
002.OH.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000	2.100.000	100,00%	0	0,00%
002.OI.521119	Belanja Barang Operasional-Lainnya	2.000.000	1.987.100	99,36%	12.900	0,65%
002.OJ.522141	Belanja Sewa	53.460.000	53.460.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		1.614.305.000	1.601.774.572	99,22%	12.530.428	0,78%

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Pencapaian program kerja dan kegiatan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Belanja Modal

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi ABT	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Belanja Modal	0	691.314.000	685.897.744	99,2	5.416.256

Tabel 3.37 Rincian Belanja Modal Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
051.0A.533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Renovasi Gedung Kantor)	492.314.000	486.897.744	98,90%	5.416.256	1,11%
051.0B.533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Renovasi Plafon)	199.000.000	199.000.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		691.314.000	685.897.744	98,90%	5.416.256	0,79%

Anggaran Belanja Tambahan berupa Belanja 53 yang masuk pada akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada Semester II Tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk Renovasi tangga kantor yang mengalami keretakan dan runtuh, serta digunakan untuk renovasi plafon di beberapa ruangan di lantai 2 Gedung Pengadilan Agama Pamekasan

2. DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Nomor DIPA-005.04.2.401540/2023 tanggal 30 November 2022 dengan total pagu Rp 95.500.000,-

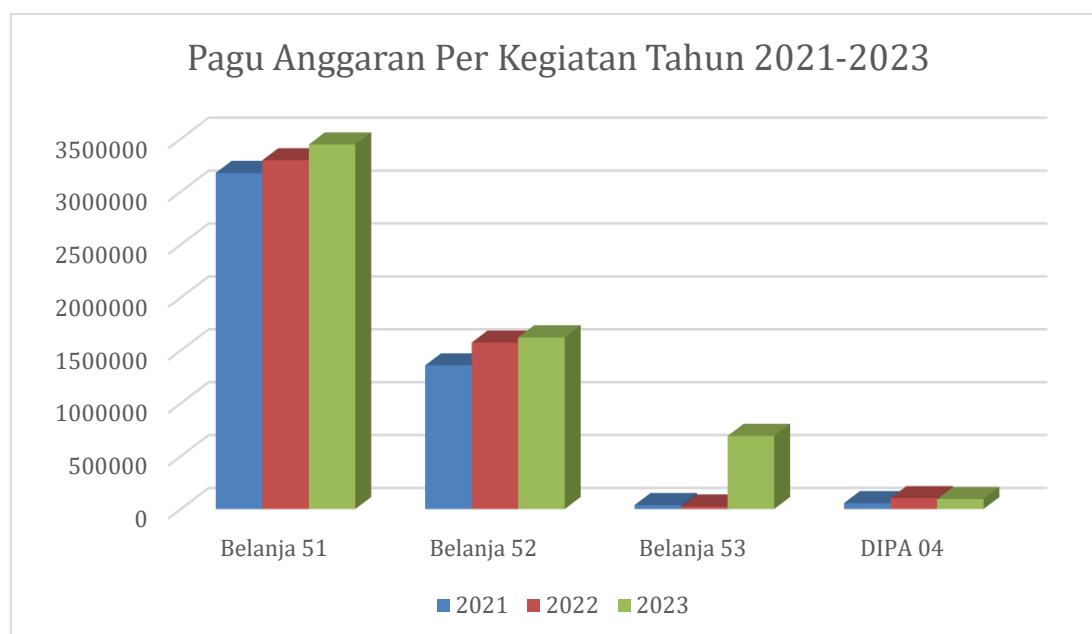
Dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023 terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran DIPA 04

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Belanja Barang	95.500.000	-	95.261.000	99,75	239.000

Tabel 3.39 Rincian DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Thn 2023

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	70.000.000	69.996.000	99,99%	4.000	0,01%
1053.QCA.001	Pembebasan Biaya Perkara					
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	1.800.000	1.800.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	10.050.000	98,53%	150.000	1,49%
1053.QCA.002	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan					
522141	Beban Sewa	1.415.000	1.415.000	100,00%	0	0,00%
524113	Biaya Perjalanan Transport dalam Kota	12.085.000	12.000.000	99,30%	85.000	0,71%
Jumlah		95.500.000	95.261.000	99,75%	239.000	0,25%



Hambatan dan Kendala :

- a. Penggunaan anggaran pada DIPA 01 menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, dibuktikan dengan

realisasi anggaran DIPA 01 di Pengadilan Agama Pamekasan rata-rata di atas 99%. Namun perlu diperhatikan agar kedepannya penyerapan anggaran di Pengadilan Agama Pamekasan dapat mencapai 100% dengan memperhatikan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Pamekasan dapat maksimal.

- b. Penggunaan anggaran pada DIPA 04 dengan rincian pembebasan biaya perkara terealisasi 98,53%%; karena terdapat sisa 1 (satu) kali panggilan dalam akun Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota sehingga tersisa Rp 150.000,-. Layanan posbakum terealisasi 99,99%; karena PA Pamekasan dalam melakukan pembayaran kepada posbakum tiap bulan, sedangkan anggaran jika dibagi 12 bulan tidak genap dan menyisakan Rp 4.000,-. Dan Penyelesaian perkara di luar Gedung pengadilan terealisasi 99,30% karena sisa dana Rp 85.000 kurang dari biaya transport sebesar Rp 100.000 sehingga tidak dapat dicairkan.

04

PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2023 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi;
 - c. Index kepuasan pencari keadilan;
 - d. Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima kepada para pihak tepat waktu;
 - e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - f. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - g. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan;
 - h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
 - i. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2024.

B. SARAN

1. SASARAN STRATEGIS I

- a) Monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- b) Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui Rapat Bulanan, Rapat Kepaniteraan, maupun group whatsapp internal;
- c) Memaksimalkan penggunaan *court calendar* untuk penyelesaian perkara
- d) Meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas sumber daya Hakim dan tenaga teknis melalui diskusi hukum dan bimbingan teknis
- e) Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan terbaru
- f) Meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas sumber daya Hakim dan tenaga teknis melalui diskusi hukum dan bimbingan teknis
- g) Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan terbaru
- h) Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan
- i) Melengkapi Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada

SASARAN STRATEGIS II

- a) Mempercepat minutasi pada hari yang sama saat putusan
- b) Mempercepat upload putusan melalui direktori putusan pada hari yang sama saat putusan
- c) Mempercepat proses pemberkasan perkara yang telah putus dibuat arsip berkas perkara pada hari yang sama
- d) Melakukan DDTK kepada petugas layanan produk pengadilan agar memberikan layanan prima
- e) Meningkatkan kualitas SDM Mediator, serta memahami karakter dan budaya setempat
- f) Memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kelebihan/manfaat mediasi, serta dampak perceraian

- g) Meningkatkan sarana dan prasarana ruang mediasi agar menunjang proses mediasi

SASARAN STRATEGIS III

- a) Membuat pengumuman tentang pengadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Pamekasan
- b) Membuat MoU dengan Lembaga bantuan hukum yang menang lelang
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan posbakum
- d) Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait pelaksanaan sidang keliling
- e) Menyusun tim pelaksanaan sidang keliling
- f) Melakukan MoU dengan pihak-pihak terkait, misal KUA dan Pemerintah Desa tentang pelaksanaan sidang keliling
- g) Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DIPA 04 Sidang di Luar Gedung
- h) Melaksanakan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembebasan biaya perkara kepada para pihak pada saat pendaftaran
- i) Mengumumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut melalui poster / banner
- j) Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DIPA 04 pembebasan biaya perkara

SASARAN STRATEGIS IV

- a) Melakukan koordinasi lintas sektoral yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pihak keamanan
- b) Melakukan rapat untuk menelaan dan mengkaji eksekusi termasuk memahami obyek eksekusi terkait potensi sehingga eksekusi dapat dilaksanakan

05

LAMPIRAN





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: 2595/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/XII/2023
Tentang
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa untuk melaksanakan pencapaian visi, misi, motto dan tujuan serta sasaran Pengadilan Agama Pamekasan, serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023;
3. Bahwa nama-nama pegawai yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (MenPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang penetapan Kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi ;

6. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 Pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- Ketiga : Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Mashuri

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: 2595/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 28 Desember 2023
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	Pelindung /Penasehat
2.	Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	St. Khodijah, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Akhmadi, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Zainal Arifin, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH,	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11.	Nabila Rifda Darmawanti, S.El.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
13.	Ahmad Syarqawi, S.Pd.I.	PPNPN	Anggota
14.	Ahmad Bahri, S.H.	PPNPN	Anggota
15.	Mohammad Hadi Risqianto, S.H.	PPNPN	Anggota
16.	Hairil Anwar, S.Kom.	PPNPN	Anggota
17.	Samsul Muarif, S.H.	PPNPN	Anggota



Disetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Mashuri

PERJANJIAN KINERJA

MAHKAMAH AGUNG
TAHUN

2023



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Januari 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	100% 4% 50% 25% 80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20% 25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	30% 100% 100% 100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b) Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	65,69%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp164.649.615.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp12.081.568.795.000
JUMLAH		Rp12.246.218.410.000

Jakarta, 1 Januari 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.





Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
Jl. Raya Tlanakan no 9, Pamekasan

Perjanjian KINERJA 2023



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



pa-pamekasan.go.id



pa.pmk126@gmail.com



089603169776

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.**

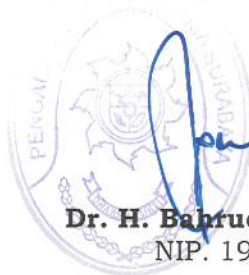
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Pamekasan, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

M.Syaefuddin, S.H.I, M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	98%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	98%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000

2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934.000
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan Pembebasan biaya/ Prodeo	100%	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	30 Perkara	12,000,000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	248 Perkara	13.500.000
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	700 Layanan	70.000.000

4	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
---	---	---	-----	---	---	--	------------	---------------

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 95.500.000
2	- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.896.934.000
		Rp 4.992.434.000


Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Pamekasan, 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ST. KHODIJAH, S.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Pamekasan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


M. Syaefuddin, S.H.I, M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007

Pamekasan, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,


ST. KHODIJAH, S.H.
NIP. 19650101 199403 2 006

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	98%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	98%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4,896,934,000

2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan Pembebasan biaya/ Prodeo	100%	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	30 Perkara	12,000,000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	248 Perkara	13.500.000

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	700 Layanan	70.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 95.500.000
2	- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.896.934.000
		Rp 4.992.434.000



Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007

Pamekasan, 02 Januari 2023
Panitera

ST. Khodijah. SH
NIP. 19650101 199403 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMADI, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

M.Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19791213 200604 1 007

Pamekasan, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,

Akhmadi, S.H.
NIP. 19700609 199103 1 001

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran/Rp.
1	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
2	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
3	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
4	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000

5	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	94%	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
6	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000
7	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.896.934.000

No	Kegiatan	Anggaran
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.896.934.000



Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

NIP. 19791213 200604 1 007

Pamekasan, 02 Januari 2023
Sekretaris,

Akhmedi, S.H.

NIP. 19700609 199103 1 001

**PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

No.	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan Diputus								Sisa akhir	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa awal	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Perdamaian	Jumlah lajur 6 s/d 12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Izin Poligami	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	27	522	549	48	447	4	11	3	3	0	516	33	0	0	0	
7	Cerai Gugat	54	1.000	1.054	89	884	3	6	2	0	0	984	70	1	0	0	
8	Harta Bersama	4	0	4	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
9	Penguasaan Anak	2	5	7	0	5	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	0	53	53	0	51	0	1	0	0	0	52	1	0	0	0	
15	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Asal Usul Anak	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
20	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	38	693	731	30	666	11	3	8	0	0	718	13	0	0	0	
22	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Dispensasi Kawin	5	184	189	6	182	0	0	0	0	0	188	1	0	0	0	
24	Wali Adhol	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
25	Ekonomi Syariah	0	4	4	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
26	Kewarisan	0	8	8	1	0	1	2	0	0	1	5	3	0	0	0	
27	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hibah	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
30	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Zakat / Infaq / Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	38	38	7	30	0	0	0	0	0	37	1	0	0	0	
32	Lain-Lain	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	JUMLAH	130	2.520	2.650	185	2.280	19	23	13	3	3	2.526	124	1	0	0	

**PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Diterima tahun 2023	Dicabut Tahun 2023	Diputus tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1	Izin Poligami	0	3	1	1	1
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	27	522	48	468	33
7	Cerai Gugat	54	1.000	89	895	70
8	Harta Bersama	4	0	1	3	0
9	Penguasaan Anak / Hadanah	2	5	0	6	1
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	53	0	52	1
15	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0
17	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0
18	Ganti rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0
19	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak	0	2	0	2	0
20	Penolakan kawin campur	0	0	0	0	0
21	Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah	38	693	30	688	13
22	Izin Kawin	0	0	0	0	0
23	Dispensasi Kawin	5	184	6	182	1
24	Wali Adhol	0	5	0	5	0
25	Ekonomi Syari'ah	0	4	2	2	0
26	Kewarisan	0	8	1	4	3
27	Wasiat	0	0	0	0	0
28	Hibah	0	1	0	1	0
29	Wakaf	0	0	0	0	0
30	Zakat / Infaq / Shodaqoh	0	0	0	0	0
31	Penetapan Ahli Waris / P3HP	0	38	7	30	1
32	Lain-Lain	0	2	0	2	0
Jumlah		130	2.520	185	2.341	124

**REKAPITULASI HASIL MEDIASI
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

Beban Perkara (Sisa Lalu + Diterima)	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi						Sisa Mediasi
		Berhasil dengan Akta	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat dilaksanakan	Total	
2.650	182	3	2	45	114	1	165	17

**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

No.	PERIODE BULAN	ANGGARAN					KINERJA (LAYANAN)					JUMLAH LAYANAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S.D BULAN INI	PROSENTASE	SISA	TARGET	REALISASI BULAN INI	REALISASI S.D BULAN INI	PROSENTASE	SISA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JANUARI	70.000.000	0	0	0,00%	70.000.000	382	0	0	0,00%	382	0	0	0
2	FEBRUARI	70.000.000	5.833.000	5.833.000	8,33%	64.167.000	382	126	126	32,98%	256	68	58	126
3	MARET	70.000.000	5.833.000	11.666.000	16,67%	58.334.000	382	135	261	68,32%	121	57	78	135
4	APRIL	70.000.000	5.833.000	17.499.000	25,00%	52.501.000	382	33	294	76,96%	88	16	17	33
5	MEI	70.000.000	5.833.000	23.332.000	33,33%	46.668.000	382	105	399	104,45%	17	30	75	105
6	JUNI	70.000.000	5.833.000	29.165.000	41,66%	40.835.000	382	81	480	125,65%	98	34	47	81
7	JULI	70.000.000	5.833.000	34.998.000	50,00%	35.002.000	382	70	550	143,98%	168	36	34	70
8	AGUSTUS	70.000.000	5.833.000	40.831.000	58,33%	29.169.000	382	65	615	160,99%	233	40	25	65
9	SEPTEMBER	70.000.000	5.833.000	46.664.000	66,66%	23.336.000	382	82	697	182,46%	315	40	42	82
10	OKTOBER	70.000.000	11.666.000	58.330.000	83,33%	11.670.000	382	84	781	204,45%	399	46	38	84
11	NOPEMBER	70.000.000	5.833.000	64.163.000	91,66%	5.837.000	382	85	866	226,70%	484	42	43	85
12	DESEMBER	70.000.000	5.833.000	69.996.000	99,99%	4.000	382	68	934	244,50%	552	26	42	68
JUMLAH			69.996.000			4.000		934			-552	435	499	934

TARGET ANGGARAN = 70.000.000
REALISASI ANGGARAN = 69.996.000
SISA = 4.000

TARGET PERKARA = 382
REALISASI PERKARA = 934
LEBIH / KURANG = 552 Melebihi Target

**LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

NO.	PERIODE BULAN	ANGGARAN					PERKARA				
		PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S.D BULAN INI	PROSENTASE	SISA	TARGET	GUGATAN	PERMOHONAN	REALISASI BULAN INI	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	JANUARI	12.000.000	0	0	0,00%	12.000.000	30	0	0	0	30
2	FEBRUARI	12.000.000	0	0	0,00%	12.000.000	30	0	0	0	30
3	MARET	12.000.000	5.250.000	5.250.000	43,75%	6.750.000	30	4	19	23	7
4	APRIL	12.000.000	3.300.000	8.550.000	71,25%	3.450.000	30	0	0	0	7
5	MEI	12.000.000	3.300.000	11.850.000	98,75%	150.000	30	1	6	7	0
6	JUNI	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
7	JULI	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
8	AGUSTUS	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
10	OKTOBER	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
11	NOPEMBER	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
12	DESEMBER	12.000.000	0	11.850.000	98,75%	150.000	30	0	0	0	0
JUMLAH			11.850.000			150.000		5	25	30	0

TARGET ANGGARAN = 12.000.000
REALISASI ANGGARAN = 11.850.000

TARGET PERKARA = 30
REALISASI PERKARA = 30

SISA =

150.000

SISA =

0

**LAPORAN SIDANG KELILING / SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

NO.	BULAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	REALISASI S.D BULAN INI	PROSENTASE	SISA	LOKASI SIDANG	REALISASI PERKARA						PELAKSANAAN KEGIATAN		KETERANGAN
									TARGET	GUGATAN	PERMOHONAN	JUMLAH	REALISASI S.D BULAN INI	PROSENTASE	JUMLAH	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	13.500.000	0	0	0	0,00%	13.500.000	-	248	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2	FEBRUARI	13.500.000	0	3.290.000	3.290.000	24,37%	10.210.000	MA Darul Ulum II Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan	248	0	56	84	84	33,87%	2	2	Jarak lokasi 30 km dari PA
								MWCNU Palengaan Pamekasan		0	28						
3	MARET	13.500.000	0	3.300.000	6.590.000	48,81%	6.910.000	MWCNU Palengaan Pamekasan	248	0	57	86	170	68,55%	2	2	Jarak lokasi 17 km dari PA
								Kantor Kecamatan Pegantenan		0	29						
4	APRIL	13.500.000	0	0	6.590.000	48,81%	6.910.000		248	0	0	0	170	68,55%	0	0	
5	MEI	13.500.000	0	0	6.590.000	48,81%	6.910.000	Kantor Kecamatan Pademawu	248	9	0	9	179	72,18%	0	0	Jarak lokasi 9,4 km dari PA (Pembulatan 10 km)
6	JUNI	13.500.000	0	3.300.000	9.890.000	73,26%	3.610.000	Yayasan Ponpes Nurul Ulum umar Zayyadi	248	0	32	43	222	89,52%	2	2	Jarak lokasi 42 km dari PA
								Kantor Kecamatan Pegantenan		10	1						
7	JULI	13.500.000	0	0	9.890.000	73,26%	3.610.000	-	248	0	0	0	222	89,52%	0	0	
8	AGUSTUS	13.500.000	0	1.650.000	11.540.000	85,48%	1.960.000	Kantor Kecamatan Pegantenan	248	0	18	18	240	96,77%	1	1	Jarak lokasi 21 km dari PA
9	SEPTEMBER	13.500.000	0	1.875.000	13.415.000	99,37%	85.000	Kantor Kecamatan Pademawu	248	7	1	8	248	100,00%	0	0	Jarak lokasi 9,4 km dari PA (Pembulatan 10 km)
10	OKTOBER	13.500.000	0	0	13.415.000	99,37%	85.000	-	248	0	0	0	248	100,00%	0	0	
11	NOVEMBER	13.500.000	0	0	13.415.000	99,37%	85.000	-	248	0	0	0	248	100,00%	0	0	
12	DESEMBER	13.500.000	0	0	13.415.000	99,37%	85.000	-	248	0	0	0	248	100,00%	0	0	
JUMLAH				13.415.000			85.000		2.976	26	222	248			7	7	

TARGET ANGGARAN = 13.500.000
REALISASI ANGGARAN = 13.415.000
SISA = 85.000

TARGET PERKARA = 248
REALISASI PERKARA = 248
SISA = 0

**REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PK DAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023**

No.	Pengadilan Agama	Perkara Banding		Perkara Kasasi		Perkara PK		Eksekusi	
		Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Dilaksanakan
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	1	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	1	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	1	1	1	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	1	0	0	1	0	0	0	0
10	OKTOBER	1	1	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	1	1	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		5	5	1	2	0	0	0	0

SCREENSHOT
STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PER BULAN
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2023



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

Home | Banding | Kasasi | Peninjauan Kembali | Eksekusi | Status Penahanan | Status Perkara | Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan | Pilih Tahun

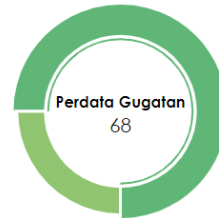
Januari | 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:54:46

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	87	191	68	167	87.43 %	111	148
2	PERDATA PERMOHONAN	43	139	22	129	92.81 %	53	73
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0.00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

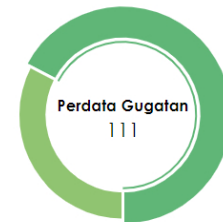
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (68)
 PERDATA PERMOHONAN (22)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 111 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 53 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

Home Banding Kasasi Peninjauan Kembali Eksekusi Status Penahanan Status Perkara Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

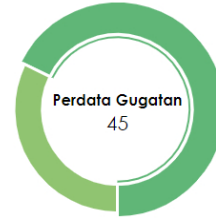
Februari 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:55:07

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	111	113	45	110	97,35 %	114	148
2	PERDATA PERMOHONAN	53	130	21	68	52,31 %	115	130
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

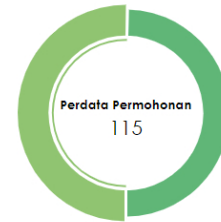
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (45)
PERDATA PERMOHONAN (21)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



- PERDATA GUGATAN 114 Perkara
- PERDATA PERMOHONAN 115 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home Banding Kasasi Peninjauan Kembali Eksekusi Status Penahanan Status Perkara Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

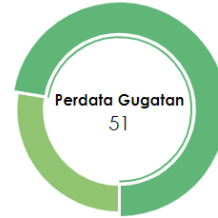
Maret 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:55:31

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	114	101	51	95	94,04 %	120	119
2	PERDATA PERMOHONAN	115	63	19	140	222,22 %	38	109
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

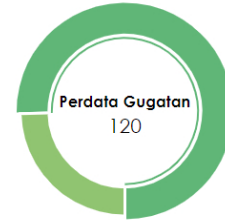
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (51)
 PERDATA PERMOHONAN (19)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 120 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 38 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

[Home](#) |
 [Banding](#) |
 [Kasasi](#) |
 [Peninjauan Kembali](#) |
 [Eksekusi](#) |
 [Status Penahanan](#) |
 [Status Perkara](#) |
 [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

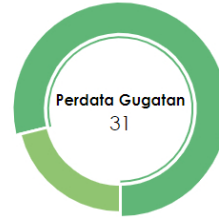
April |
 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:56:05

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	120	61	31	75	122,95 %	106	87
2	PERDATA PERMOHONAN	38	28	8	42	150,00 %	24	91
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

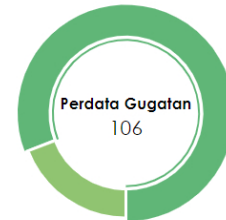
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (31)
PERDATA PERMOHONAN (8)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 106 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 24 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

[Home](#) |
 [Bandung](#) |
 [Kasasi](#) |
 [Peninjauan Kembali](#) |
 [Eksekusi](#) |
 [Status Penahanan](#) |
 [Status Perkara](#) |
 [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

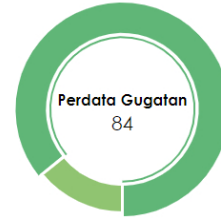
Mei 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:56:19

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	106	188	84	116	41.70 %	178	73
2	PERDATA PERMOHONAN	24	105	13	49	46.67 %	80	27
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0.00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

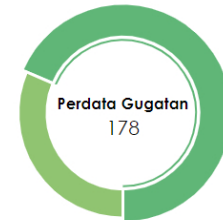
STATISTIK PERKARA ECOURT



○ PERDATA GUGATAN (84)
○ PERDATA PERMOHONAN (13)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 178 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 80 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

Home | Banding | Kasasi | Peninjauan Kembali | Eksekusi | Status Penahanan | Status Perkara | Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan | Pilih Tahun

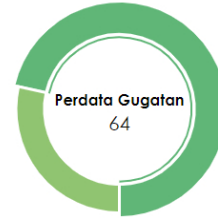
Juli | 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:56:52

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	158	122	64	124	101,64 %	156	123
2	PERDATA PERMOHONAN	31	116	25	41	35,34 %	106	107
3	GUGATAN SEDERHANA	-	3	-	1	33,33 %	2	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

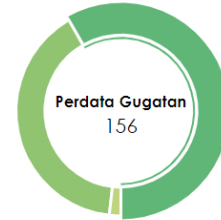
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (64)
 PERDATA PERMOHONAN (25)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



- 1. PERDATA GUGATAN 156 Perkara
- 2. PERDATA PERMOHONAN 106 Perkara
- 3. GUGATAN SEDERHANA 2 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

Home Banding Kasasi Peninjauan Kembali Eksekusi Status Penahanan Status Perkara Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

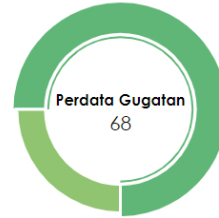
Agustus 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:57:14

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	156	129	68	129	100.00 %	156	137
2	PERDATA PERMOHONAN	106	53	22	123	232.06 %	36	104
3	GUGATAN SEDERHANA	2	-	-	2	200.00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

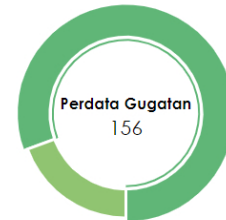
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (68)
PERDATA PERMOHONAN (22)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



- PERDATA GUGATAN 156 Perkara
- PERDATA PERMOHONAN 36 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

[Home](#) |
 [Banding](#) |
 [Kasasi](#) |
 [Peninjauan Kembali](#) |
 [Eksekusi](#) |
 [Status Penahanan](#) |
 [Status Perkara](#) |
 [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

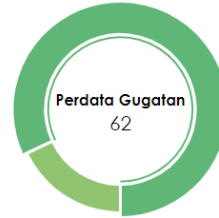
Septeml |
 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:57:28

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	156	135	62	128	94.81 %	163	111
2	PERDATA PERMOHONAN	36	48	13	51	106.25 %	33	54
3	GUGATAN SEDERHANA	-	1	-	-	0.00 %	1	2
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

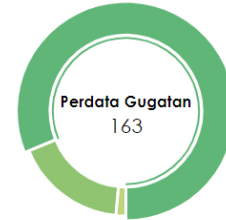
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (62)
PERDATA PERMOHONAN (13)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 163 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 33 Perkara
3. GUGATAN SEDERHANA 1 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

[Home](#) |
 [Bandung](#) |
 [Kasasi](#) |
 [Peninjauan Kembali](#) |
 [Eksekusi](#) |
 [Status Penahanan](#) |
 [Status Perkara](#) |
 [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

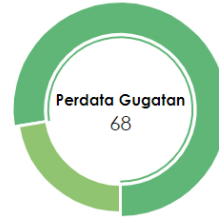
Oktober |
 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:57:41

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	163	145	68	159	109.66 %	149	162
2	PERDATA PERMOHONAN	33	94	19	59	62.77 %	68	70
3	GUGATAN SEDERHANA	1	-	-	-	0.00 %	1	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

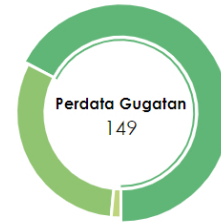
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (68)
PERDATA PERMOHONAN (19)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 149 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 68 Perkara
3. GUGATAN SEDERHANA 1 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

[Home](#) |
 [Banding](#) |
 [Kasasi](#) |
 [Peninjauan Kembali](#) |
 [Eksekusi](#) |
 [Status Penahanan](#) |
 [Status Perkara](#) |
 [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

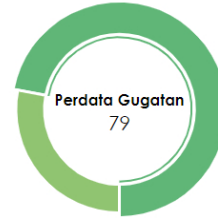
Novemik 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:57:57

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	149	162	79	130	80.25 %	181	125
2	PERDATA PERMOHONAN	68	106	30	128	120.75 %	46	82
3	GUGATAN SEDERHANA	1	-	-	1	100.00 %	-	1
4	JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0.00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0.00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

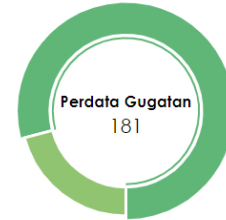
STATISTIK PERKARA ECOURT



○ PERDATA GUGATAN (79)
○ PERDATA PERMOHONAN (30)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



1. PERDATA GUGATAN 181 Perkara
2. PERDATA PERMOHONAN 46 Perkara

[Perbaharui Data](#)



DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) | [Dashboard](#)

Home Banding Kasasi Peninjauan Kembali Eksekusi Status Penahanan Status Perkara Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan Pilih Tahun

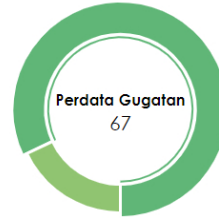
Desemb 2023

Update terakhir : 26-02-2024 16:58:12

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	PERDATA GUGATAN	181	94	67	167	177,66 %	108	136
2	PERDATA PERMOHONAN	46	31	14	61	136,77 %	16	98
3	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	PRAPERADILAN JINAYAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	JINAYAT ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-

[Perbaharui Data](#)

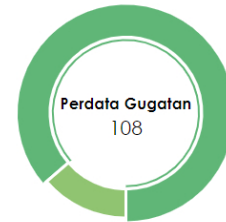
STATISTIK PERKARA ECOURT



PERDATA GUGATAN (67)
 PERDATA PERMOHONAN (14)

[Perbaharui Data](#)

RASIO BEBAN PERKARA



- PERDATA GUGATAN 108 Perkara
- PERDATA PERMOHONAN 16 Perkara

[Perbaharui Data](#)